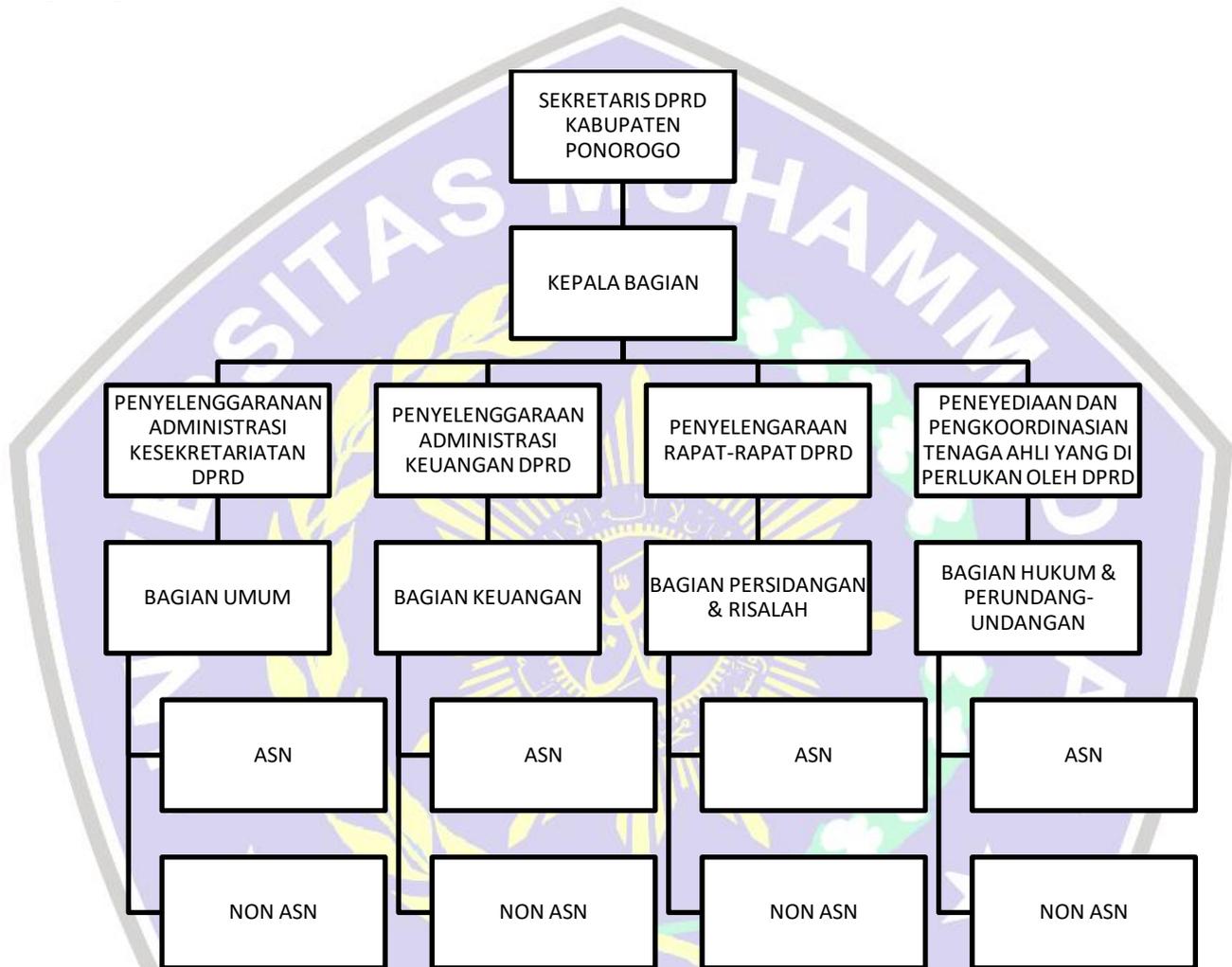


BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Struktur organisasi dalam Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

B. Pembahasan

Agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan maka perlu dibuatkan struktur organisasi, menurut Hasibuan (2011:128) struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Siswanto (2005:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi

atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.

Mekanisme Koordinasi Antar Bagian

Menurut Ndraha “koordinasi melekat menjadi fungsi organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal maupun koordinasi eksternal harus berjalan. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien”. (Ndraha, 2003:290) Definsi selanjutnya mengenai koordinasi adalah definisi yang diberikan oleh Manullang (2008) yaitu: “Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi” (Manullang, 2008:72). Untuk memastikan terciptanya koordinasi yang baik, diterapkan mekanisme koordinasi rutin antar bagian. Pertemuan koordinasi, baik secara formal maupun informal, dijadwalkan secara berkala guna memastikan saling informasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing. Koordinasi ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pemahaman terkait isu-isu yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

Peningkatan Efisiensi Operasional

Menurut Agus Maulana “pengertian efisiensi adalah kemampuan suatu unit organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh instansi”. (Agus Maulana, 2005:46) Melalui prosedur pembagian tugas yang telah ditetapkan, terlihat peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas meminimalkan potensi tumpang tindih dan memungkinkan staf fokus pada bidangnya masing-masing. Ini juga memberikan landasan bagi pengembangan kompetensi dan keahlian yang lebih spesifik sesuai dengan tugas yang diemban.

Sinergi Antara Bagian

Menurut James A.F. Stoner (1996:105) “Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas.” Menurut Abdul Syani (1997:85) “Pembagian tugas adalah pemecahan tugas dengan demikian rupa sehingga setiap orang atau karyawan dalam organisasi bertanggungjawab dan melaksanakan aktivitas tertentu saja. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, tercipta sinergi yang kuat antara berbagai bagian di Sekretariat DPRD. Setiap bagian dapat fokus pada perannya masing-masing tanpa adanya kebingungan terkait tugas dan tanggung jawab. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung produktivitas tinggi.

Pengoptimalan Sumber Daya

Proses pembagian tugas ini juga mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kinerja organisasi, kinerja sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program serta kebijakan dengan menggunakan sejumlah sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring 2012:81). Dengan menempatkan staf sesuai dengan keahlian dan spesifikasi tugasnya, efisiensi operasional ditingkatkan. Hal ini dapat tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD dan masyarakat.

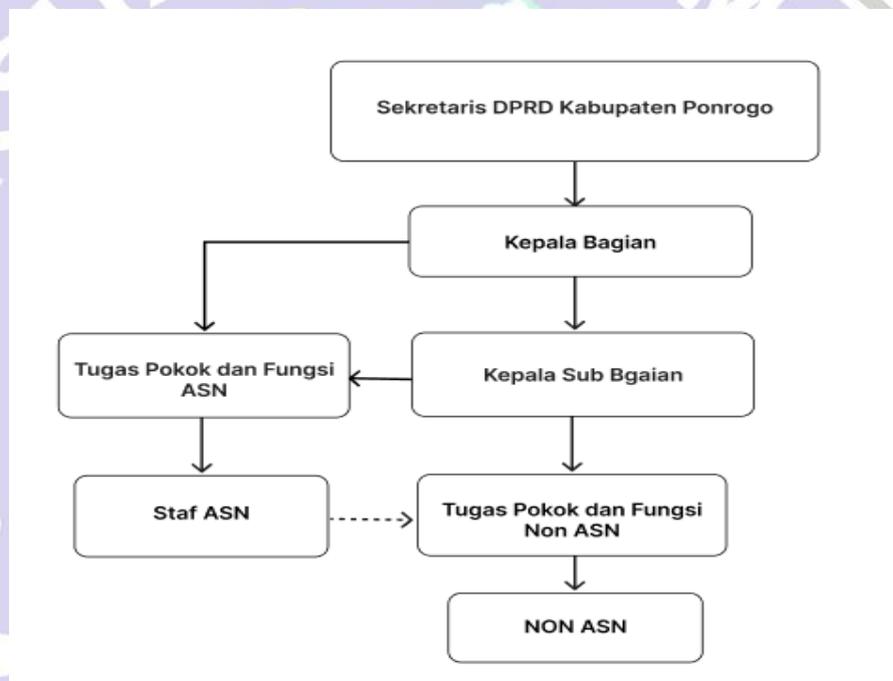
Kesesuaian dengan Tujuan Strategis

Prosedur pembagian tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga. Melalui penekanan pada tanggung jawab masing-masing bagian, prosedur ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki relevansi dengan visi dan misi DPRD Kabupaten Ponorogo.

C. Hasil

Setelah penulis melakukan penelitian Namun pada penerapannya masih terjadi masalah yang sering muncul yakni sering terjadinya pelimpahan tanggung jawab dari pegawai ASN ke pegawai non ASN, masalah ini terjadi karena belum terbentuknya tugas pokok dan fungsi pada pegawai non ASN, oleh sebab itu pegawai non ASN sering diberikan beberapa tugas sekaligus sehingga menghambat kelancara operasional dalam organisasi, beban kerja yang tidak merata menyebabkan dampak yang signifikan terhadap organisasi maupun individu pegawai.

Oleh sebab itu penulis mengusulkan pembentukan TUGAS POKOK DAN FUNGSI terutama untuk pegawai non ASN dengan rancangan bagan dibawah ini:



Gambar 1.2 Prosedur Pembagian Tugas.

Dengan terbentuknya tugas pokok dan fungsi pegawai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam organisasi, dalam proses pembagian tugas, setiap bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan dengan jelas mengenai tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, Bagian Perundang-undangan bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara Bagian Administrasi menyelenggarakan kegiatan administratif dan mendukung proses pengelolaan data anggota DPRD.